

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada proses dibangunnya demokrasi, partai politik menjadi salah satu pilar penting yang mempunyai peran dalam menghubungkan kepentingan warga dengan pemerintah, dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Partai politik merupakan sekumpulan atau perkumpulan orang yang memiliki kesamaan asas, kesamaan haluan, kesamaan tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan ideologi atau nilai tertentu. Peran dan fungsi partai politik tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan partai politik di dalam sistem demokrasi, karena kader partai yang ditempatkan sebagai wakil masyarakat ini akan menentukan kebijakan yang berdampak pada seluruh irisan masyarakat maupun konstituen partai (Nasiwan, 2012).

Secara *general* peran dan fungsi partai politik dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, partai politik dengan kewajiban internal organisasinya dimana partai perlu meningkatkan kualitas kaderisasi dengan menekankan bimbingan, pelatihan, pembekalan kapasitas intelektual demi melanggengkan ideologi politik sebagai dasar partai itu sendiri. *Kedua*, partai politik dengan kewajiban eksternal organisasi dengan peran dan fungsinya sebagai perantara masyarakat dan pemerintah juga bertanggung jawab terhadap ranah konstitusi untuk memastikan kondisi masyarakat lebih baik (Fadjar, 2013).

Menurut Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2008), fungsi partai politik di negara demokrasi terbagi menjadi empat. *Pertama*, dapat menjadi sarana komunikasi politik dengan menampung aspirasi masyarakat yang disusun hingga terstruktur dan menjadi usul kebijakan untuk parlemen. Rencana kebijakan pemerintah sepatutnya disebarluaskan sehingga terjadinya tindakan komunikatif antara masyarakat dengan partai politik. *Kedua*, menjadi penyalur sosialisasi politik, upaya partai politik dalam menyampaikan pengetahuan politik serta fenomena politik agar tercipta citra politik bahwa partai politik memihak

kepentingan umum. *Ketiga*, sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat heterogen yang berpotensi mengalami konflik besar antar masyarakat maupun masyarakat dengan negara. *Keempat*, sebagai sarana rekrutmen politik, dimana kader partai perlu melalui proses ideologisasi yang baik agar melahirkan kader yang cakap, kader partai perlu diperbanyak dengan tujuan kesejahteraan demokrasi partai politik.

Dalam sistem demokrasi seraya menjalankan fungsi, partai politik melakukan tiga aktivitas mencakup pemilihan calon, kampanye, melaksanakan fungsi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif, dan menjadi pengambil kebijakan apabila mempunyai kuasa untuk memerintah. Partai politik sendiri memiliki acuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 11 ayat 1 sebagai penyalur dan menghimpun aspirasi masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan rancangan kebijakan negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik yang dilakukan secara demokrasi dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan (Ramlan Surbakti, 2013).

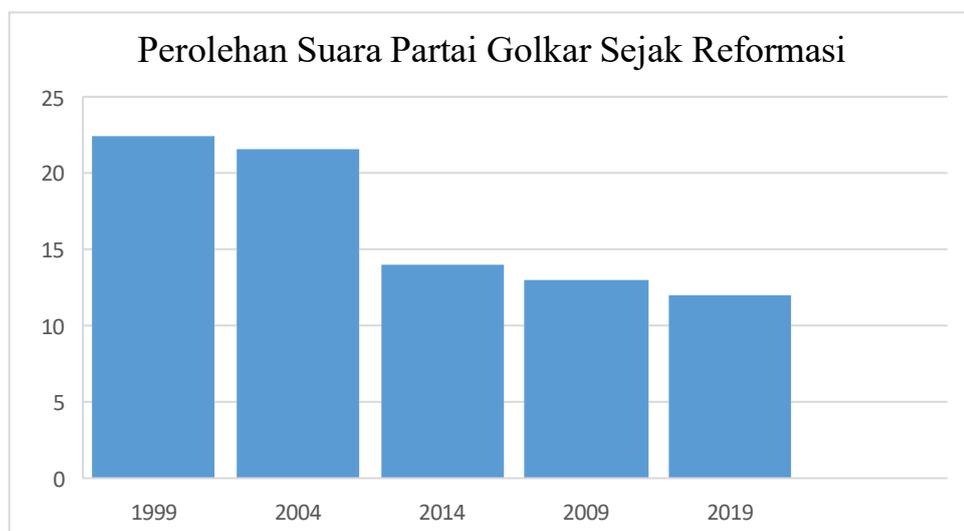
Demokrasi internal partai politik di Indonesia merupakan representasi demokrasi di negara Indonesia. Demokrasi internal partai meliputi inklusivitas, desentralisasi, sentralisasi, dan institusional partai politik. Inklusi, desentralisasi dan sentralisasi dikaitkan dengan mekanisme rekrutmen politik (Purwaningsih dan Subekti 2017). Manusia sebagai sumberdaya utama organisasi partai politik menjadi penentu keberhasilan partai politik, kualitas sumberdaya perlu ditingkatkan demi keberlangsungan partai politik. Menilik hal tersebut partai politik memiliki kecenderungan pola pragmatis dengan memanfaatkan popularitas artis, akademisi, bahkan pengusaha guna memperbesar popularitas partai politik. Ideologi partai politik sepatutnya dapat dikomunikasikan dengan baik ke dalam internal partai dan berdampak langsung pada masyarakat terkait pemahaman konseptual, pernyataan solusi permasalahan yang disampaikan kader sebagai upaya implementasi ideologi partainya (Firmanzah, 2011).

Sebagai partai yang identik dengan rezim orde baru, Partai Golongan Karya mendapatkan begitu banyak tekanan politik yang bersumber dari

masyarakat, terlebih proses demokratisasi di Indonesia diawali dengan massa reformasi dan runtuhnya rezim orde baru. Sistem kepartaian pada masa rezim orde baru Partai Golkar selalu memenangkan pemilu dengan dukungan militer dan pegawai negeri sipil. Hal tersebut membentuk sangkaan yang sentimental pada Golkar sebab dianggap tidak dapat bertahan lama pada masa reformasi. Namun pada faktanya Golkar dapat bertahan dengan mengoptimalkan kelembagaan yang dibentuk sepanjang rezim orde baru melalui hubungannya dengan lembaga-lembaga politik berskala nasional serta melakukan penyesuaian struktur dan kultur organisasi dengan prinsip reformasi. Fenomena tersebut dibuktikan dengan peraihan suara Golkar pada pemilu tahun 1999 yang berhasil meraih suara terbanyak kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) (Rahman, 2016).

Partai Golongan Karya memiliki kendali politik yang signifikan pada masa pemerintahan Soeharto, lantaran dapat menjadi *single majority* dengan konsisten mendominasi perolehan suara di atas angka 60 persen dalam enam kali Pemilu berturut-turut (Achmad Suhawi, 2018). Penurunan elektabilitas Partai Golongan Karya terjadi akibat digulingkannya pemerintahan Soeharto dan peralihan masa reformasi. Sehingga Perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 1999 berada pada angka 22,43 persen kemudian disambung oleh angka 21,57 persen pada perolehan suara Pemilu 2004. Penurunan perolehan suara yang signifikan terjadi di tahun 2009 hingga 2019 (Badan Pusat Statistik 2020).

Tabel 1.1 Perolehan Suara Partai Golkar dalam Pemilu 1999-2019



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2019)

Keberhasilan Partai Golongan Karya menjadi sorotan di tahun 2019 lantaran dapat menampilkan pemenang legislatif dengan perolehan suara terbanyak di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon dengan angka 409.034 suara (Jamil dan Kurniawan 2023).

Tabel 1.2 Daftar Nama dan Perolehan Suara Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII

No.	Nama	Partai	Perolehan Suara
1	Daniel Mutaqien Syafiuddin	Golkar	133.282
2	Dedi Wahidi	PKB	113.653
3	Ono Suro	PDIP	102.985
4	Dave Akbarshah F	Golkar	61.431
5	Netty Prasetiyani	PKS	57.047
6	Herman Khaeron	Demokrat	43.112
7	Selly Andriany Gantina	PDIP	40.026
8	Kardaya Warnika	Gerindra	37.866
9	Satori	Nasdem	28.294

Sumber: Komisi Pemilihan Umum 2019

Daniel Mutaqien Syafiuddin berhasil dilantik menjadi anggota DPR RI perwakilan Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yang mewakili Partai Golongan Karya pada periode 2014-2019 dengan perolehan suara sebanyak 133.282 yang kemudian terpilih kembali pada periode 2024-2029 dengan perolehan suara sebanyak 89.357 (Cahyoko, 2024). Daniel merupakan salah satu anggota DPR RI yang terpilih secara berturut-turut dengan merapel jabatan sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Jawa Barat dan Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Dominasi tokoh partai yang telah lama membangun citra tentunya dapat meningkatkan citra partai sehingga hal tersebut dimanfaatkan demi tercapainya angka

perolehan suara yang besar disamping terpinggirkannya kesempatan kader politis partai.

Fenomena tersebut berawal dari H. Irianto MS Syafiuddin yang membentuk klan di internal partai Golkar dan pemerintahan. Lantaran Irianto yang akrab dipanggil Yance ini pernah menduduki Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat tahun 2009-2015. Ayah dari anggota DPR RI Daniel Mutaqien ini sebelumnya menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Indramayu sembari menjabat Bupati Indramayu selama dua periode 2000-2005 dan 2005-2010 yang kemudian dilanjut oleh istrinya selama dua periode pula, Hj. Anna Sophana. Jabatan di internal Golkar juga kemudian diturunkan pada anaknya Daniel Mutaqien. Dan masih begitu banyak sosok besar di DPD Golkar Jabar yang melanggengkan praktik politik klan yang terdesak untuk dipergunakan oleh elit partai demi memperoleh kepentingannya (Rahman, 2016).

Peristiwa tersebut kemudian dibuktikan dengan proses pendaftaran Pemilihan Legislatif tahun 2019 bahwa terdapat Calon Legislatif dari Partai Golongan Karya yang menyandang status eks narapidana. Teuku Muhammad Nurlif mendapat rekomendasi menjadi Calon Legislatif melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota menurut Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golongan Karya di wilayah Sumatera pada saat itu, Ahmad Doli Kurnia (Tempo, 2018). TM Nurlif dianggap memiliki basis konstituen yang jelas dan dipercaya dapat meraup perolehan suara demi meningkatkan angka elektoral partai. Artinya pengaruh elite partai pada proses pencalonan-rekrutmen politik merupakan sumber daya yang fundamental yang berkontribusi untuk meningkatkan elektoral partai (Priamarizki, 2023).

Proses rekrutmen yang dilakukan Partai Golkar secara umum pada bakal calon anggota legislatif sendiri perlu sesuai dengan AD/ART, Juklak, Juknis, Peraturan Organisasi (PO) serta bahwa rekrutmen bakal calon anggota legislatif perlu dinilai aspek pendidikan, pengalaman organisasi, dan pemahaman terhadap Undang-Undang yang berkaitan, kemudian melalui penilaian bobot dari skor Prestasi, Dedikasi, Disiplin, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PD2LT). Rekrutmen

calon legislatif perlu dilakukan selaras dengan kebijakan partai, namun dalam konteks penilaian skor PD2LT terhadap partai berdasarkan internal seringkali terpengaruh oleh peristiwa yang bersifat subjektif. Sehingga kondisi tersebut tidak jarang membentuk konflik internal berbentuk kecemburuan politik yang acapkali menyebabkan tekanan pada kader partai dan berpindah haluan ke partai politik lain (Kurniadi, 2014).

Konflik internal partai Golongan Karya timbul sebagai partai terbuka disebabkan oleh terbenturnya kepentingan internal partai yang memiliki dampak pada kelembagaan partai. Pada tahun 2017 kader partai Golongan Karya tak sedikit yang berupaya mendapatkan surat rekomendasi partai dengan ditunjukan melalui loyalitasnya kepada ketua umum partai dan bukan melalui kaderisasi partai yang perlu dilembaga dengan baik (Nurjaman, 2018). Pragmatisme politik ini berlanjut hingga Pemilu 2024 dimana sejumlah selebritis lolos menjadi calon legislatif partai Golongan Karya. Walaupun presentase selebritis yang bergabung dengan Partai Golongan Karya relatif kecil, tetapi sejumlah selebritis tetap mewarnai Pemilu 2024 seperti bintang film Nurul Arifin, jurnalis sekaligus selebritas Meutya Hafid, dan lain sebagainya hingga Wanda Hamidah (Politiknesia, 2023). Menurut Lucius Karus, calon legislatif yang berasal dari kelompok selebriti dapat mempromosikan partai dengan baik dibandingkan kader partai itu sendiri. Hal tersebut berdampak pada performa legislatif yang buruk disebabkan oleh tujuan partai yang memiliki nafsu untuk memperbanyak kuantitas kursi di parlemen ketimbang memperkuat kinerja (BBC News Indonesia 2023).

Kesulitan regenerasi kepemimpinan cenderung melahirkan faksi politik serta menimbulkan partai yang meninggalkan ideologinya demi keberhasilan kepentingan Pemilu atau *catch all party* (Mendrofa dan Efriza, 2022). Kepentingan partai kemudian tak lagi satu suara dengan konflik ideologi partai yang dibuktikan oleh pasang surutnya partai politik pada Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009 dengan adanya perpecahan ideologi partai politik yang cenderung ke arah religius. Sebagai contoh pada Pemilu 2009 Golkar terpecah

ke dalam dua partai yaitu Hanura dan Gerindra kemudian pada 2014 mendirikan Partai NasDem. Sama halnya seperti PDIP yang terpecah dengan kelahiran Partai Demokrasi Indonesia dan partai lain berlatar belakang ideologi Marhaenisme. Konflik internal partai menjadi alasan utama kader mendirikan partai baru yang dipengaruhi oleh faktor ketua umum sebagai penggerak partai (Nurhasim, 2013). Pada konteks Pemilu 2024 sejumlah partai politik baru telah memperoleh SK Pengesahan Badan Hukum dari Kemenkumham untuk ikut berkontestasi pada Pemilu 2024 kemarin. Tak hanya atas dasar konflik internal partai, keberadaan partai politik baru di Indonesia menjadi hal yang lazim ditemukan sebagai negara dengan sistem multipartai (Barokah, 2024).

Penurunan elektabilitas Partai Golongan Karya terjadi akibat faktor internal partai dalam mengelola faksionalisme internal partai, prosesi kaderisasi, rekrutmen politik yang menyimpang, kepemimpinan sentral dan tidak menjamah *grass root*, dan kesalahan perihal komunikasi politik. Kondisi identitas politik yang kemelut juga menjadi permasalahan utama Partai Golongan Karya. Faktor eksternal juga melengkapi permasalahan partai sebab Partai Golkar dihujani persepsi negatif dari publik sebagai respon dari Golkar dalam pemerintahan dan terpecahnya Golkar menjadi Partai Gerindra dan Hanura. Faktor lain yang memengaruhi penurunan dukungan Partai Golkar berada pada ketidakmampuan mengantisipasi sistem suara terbanyak (Yuda, 2011).

Fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik pada bagan internal partai ataupun eksternal partai memerlukan kader-kader berkualitas untuk didistribusikan menjadi calon pemimpin. Partai politik memiliki kewajiban memperbanyak anggota dengan membuka seluas-luasnya jalan melalui organisasi massa yang melibatkan mahasiswa, pemuda, perempuan, buruh, demi berjalannya proses rekrutmen politik (Budiardjo 2008). Pada dasarnya, setiap partai politik memiliki mekanisme tersendiri dalam pemilihan pemimpin, dapat melalui musyawarah, aklamasi ataupun *votting*, dan semua mekanisme tersebut tertuang dalam AD/ART partai. Namun kecenderungan yang terjadi dalam runtutan realitas pemilihan pemimpin partai ini ialah aklamasi yaitu dengan

calon tunggal, bak tidak membuka peluang bagi kader partai lain. Pun ketika pengisian struktur pengurus partai posisi-posisi strategis partai politik diisi oleh kerabat ketua partai, tanpa melalui sebuah mekanisme yang demokratis.

Personalisasi partai politik menyebabkan kepemimpinan sentral yang menjadi figur dengan mengambil alih fungsi pelembagaan kepartaian. Ruang demokrasi internal partai menjadi tertutup karena penempatan kekuasaan partai politik berada hanya pada tokoh sentral partai, terutama pada saat pemilu. Kemudian hal itu menjadi sebab partai politik mendominasi kebijakan partai serta menghegemoni berlangsungnya kebijakan pemerintahan (Ekawati dan Sweinstani 2020). Partai politik merupakan faktor utama penghubung masyarakat dengan pemerintah khususnya badan legislatif, kehadiran personalisasi partai akibat tidak sempurnanya demokrasi internal partai politik menimbulkan fenomena bahwa partai hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk menghegemoni kursi-kursi legislatif dengan mengedepankan kepentingan partai, di atas kepentingan masyarakat.

Personalisasi partai akibat menjamurnya demokrasi internal partai politik seharusnya dihindari, karena memiliki potensi buruk bagi partai politik dan demokrasi Indonesia dalam jangka panjang. Penelitian ini ditujukan untuk memperluas pengetahuan khalayak terkait pengaruh demokrasi partai politik terhadap proses legislasi di Indonesia. Peneliti berharap analisis ini dapat menjadi acuan serta membuka wawasan khalayak mengenai demokrasi internal partai politik yang dilihat melalui rekrutmen calon legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya pada Pemilu 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses rekrutmen calon legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024?
2. Bagaimana pengaruh faktor personalisasi partai politik terhadap dinamika internal Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat dalam konteks Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan proses rekrutmen calon legislatif pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024.
2. Untuk menggambarkan faktor personalisasi partai politik serta pengaruhnya terhadap demokrasi internal Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat pada Pemilu 2024.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada tujuan penelitian di atas maka penulis mengharapkan manfaat dari hasil penelitian berupa:

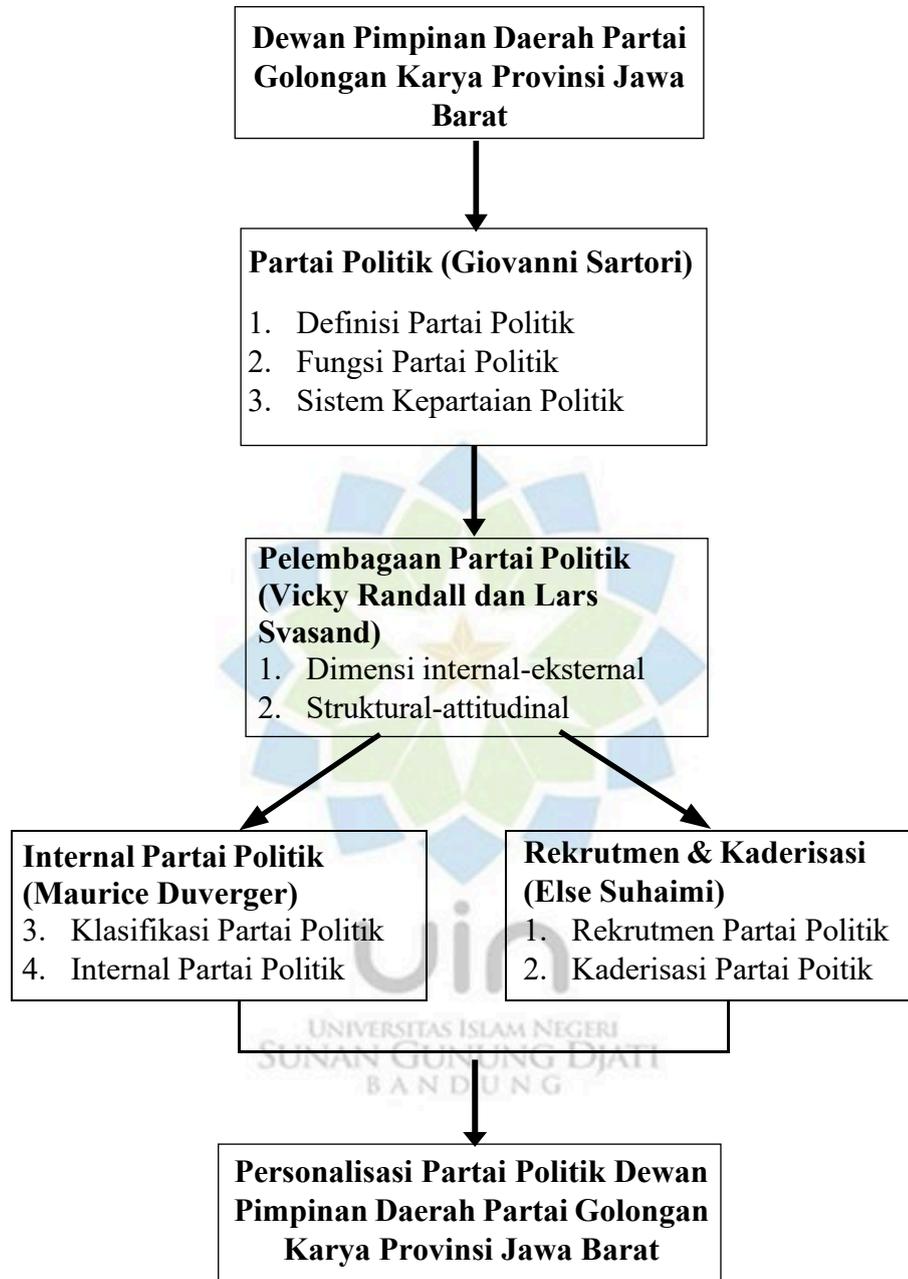
a) Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi acuan serta membuka wawasan khalayak mengenai demokrasi internal partai politik yang dilihat melalui rekrutmen calon legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya pada Pemilu 2024.

b) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga pendidikan, terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka memberikan kerangka dasar dalam memahami pelebagaan partai politik melalui studi kasus rekrutmen calon legislatif pada internal DPD Partai Golongan Karya Jawa Barat pada Pemilihan Umum 2024.

E. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1.1 menjelaskan bagan kerangka berpikir bahwa Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu partai politik yang dapat diteliti kondisi internal partainya. Keadaan internal Partai Golkar kemudian dapat dijadikan fenomena yang dapat dianalisis menggunakan teori partai

politik. Untuk memahami fenomena secara komprehensif, peneliti menggunakan pendekatan teori partai politik yang beririsan dengan teori pelebagaan partai politik, internal partai, rekrutmen dan kaderisasi. Teori pelebagaan partai politik dapat memastikan keseimbangan kekuasaan partai serta menjamin proses rekrutmen politik yang demokratis. Pelebagaan partai dapat dilihat melalui mekanisme internal partai politik, apabila tidak melembaga dengan baik prosedural demokrasinya, dapat mempengaruhi keadaan pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik.

Teori partai politik Giovanni Sartori dapat memberikan dasar melalui fungsi partai politik sebagai sebagai kunci demokrasi. Melalui klasifikasi partai politik menurut Sartori, karakter DPD Partai Golongan Karya, orientasi, serta bagaimana kepentingan partai dalam memengaruhi strategi rekrutmen calon legislatif. Teori pelebagan partai Vicky Randall dan Lars Svasand turut diuraikan guna membantu mengkategorikan kemapanan partai politik melalui dimensi internal dan eksternal partai. Situasi tersebut berkaitan dengan keberlangsungan demokrasi internal dan kemampuan partai politik dalam mengambil keputusan serta memelihara kader partainya agar tetap berkomitmen pada nilai-nilai partai.

Pelebagaan partai dapat ditinjau lebih lanjut dalam teori internal partai politik Maurice Duverger yang mana teori tersebut dapat mengklasifikasikan partai sesuai dengan interaksi pemimpin partai dengan keanggotaan partai secara kesisteman. Kemudian teori rekrutmen dan kaderisasi Else Suhaimi hadir guna memperkuat analisis melalui rekrutmen partai politik, sehingga situasi pelebagaan DPD Partai Golongan Karya Jawa Barat dapat dianalisis apabila ditinjau melalui proses rekrutmennya.

Apabila melihat fenomena ini dalam (Ramlan Surbakti, 2013) demokrasi internal partai menjadi faktor yang paling menentukan keberlangsungan demokrasi di negara dan masyarakat disamping persaingan antar partai politik dengan. Demokrasi internal partai dipandang sebagai keberhasilan partai mendistribusikan kepentingan, rekrutmen partai dengan popularitas sehingga

memiliki segmentasi politik lebih luas. Lebih daripada itu demokrasi internal partai meliputi penentuan calon legislator, dan kepala daerah melalui seleksi kandidat dengan menonjolkan karakteristik ideologi partai yang menggambarkan wajah partai kepada khalayak.

Kondisi internal partai politik merupakan bagian dari pelebagaan dengan rekrutmen sebagai tolak ukur keberhasilan partai politik. Personalisasi hadir sebagai bentuk pelebagaan partai yang lemah serta terdapat pendominasi-an tokoh. Dalam konteks Sartori personalisasi merupakan pergeseran fungsi partai politik sebagai perantara juga institusi representatif menuju kendaraan politik individu. Fenomena personalisasi menurut Randall dan Svasand ialah kondisi tidak terlebaganya partai yang ditandai dengan bergantungnya pengambilan keputusan partai tokoh tertentu alih-alih pengambilan keputusan secara kolektif. Duverger dan Else Suhaimi turut memperjelas faktor personalisasi yang dapat hadir disebabkan oleh kegagalan sistem rekrutmen dan kaderisasi yang didasari oleh kapasitas dan komitmen nilai-nilai kepartaian, melainkan berdasarkan kedekatan, afiliasi kekuasaan, dan kekuatan finansial. Sehingga personalisasi tidak hanya menjadi temuan empiris, tetapi juga menjadi indikator penting atas ketidakterlebaganya prinsip-prinsip partai sebagaimana demokrasi internal partai politik yang seharusnya.

